

Evaluasi Hasil Pembangunan Tahun 2015 & Rencana Bidang Ekonomi Tahun 2017 Propinsi Jawa Timur

Aang Afandi^a

^aJurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Malang 65141

E-mail : aang_95@yahoo.co.id

ABSTRAK

Setiap aktivitas pemerintah sangat berkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang di dalamnya terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Tentunya proses perencanaan sampai dengan kegiatan akan diakhiri dengan evaluasi pada setiap akhir periodenya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan mengenai capaian kinerja, kesuksesan/kegagalan dan apa yang mesti dilakukan pada tahap berikutnya. Dengan evaluasi ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan suatu perencanaan yang dilakukan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan laporan institusi bidang ekonomi dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dari masing - masing institusi. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum kinerja program dan kegiatan baik kinerja fisik maupun kinerja anggaran telah dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada beberapa program atau kegiatan yang kinerja masih belum tercapai secara optimal. Program dan kegiatan inilah yang idealnya dilakukan percepatan, penekanan untuk dilakukan pada tahun 2017, yang harapannya dapat mendukung capaian visi misi RPJMD 2015 – 2019 Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Kata Kunci

Rencana, evaluasi, RKPD, Propinsi Jawa Timur.

1. PENDAHULUAN

Perencanaan, merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah runtutan aktivitas manajemen dalam sebuah organisasi, termasuk pada organisasi pemerintahan. Secara jangka waktu, perencanaan dibagi dalam tiga jenis yakni rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Pada konteks pembahasan ini lebih menekankan pada perencanaan jangka pendek, yakni durasi 1 tahun, utamanya untuk tahun 2017.

Dasar perencanaan pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, untuk rencana jangka panjang menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025, Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun sebelumnya.

Setiap tahunnya, pemerintah daerah dalam hal ini Badan perencanaan Pembangunan daerah memiliki tugas untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya, evaluasi ini meliputi evaluasi bidang prasarana wilayah (di dalamnya termasuk infrastruktur), bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Dari dokumen perencanaan yang telah tersedia maka perlu di terjemahkan pada anggaran, tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks ini RKPD yang tersusun akan dijabarkan dalam bentuk APBD, yang nantinya siap untuk diimplementasikan

dalam satu tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan aktivitas pembangunan dan pemerintahan ini tentunya perlu adanya proses monitoring dan evaluasi yang tepat.

Setelah dilaksanakan evaluasi tentunya terdapat hasil yang diperoleh, berupa: hasil kinerja yang dicapai, capaian kinerja dan apa yang mesti dilakukan di masa mendatang. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar untuk perencanaan dimasa mentang, selain memanfaatkan informasi issu terkini dan hierarki perencanaan yang ada di atasnya. Dasar evaluasi yang digunakan salah satunya adalah Permendagri No 27 Tahun 2014.

2. TEORI

Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan [1] adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara [2] berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers [3] bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebagai suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara - cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP dimaksudkan sebagai upaya pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk itu, RKP tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan dengan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong partisipasi masyarakat.

Pada awalnya Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 4 menjelaskan Rencana Pembangunan Daerah meliputi: (1) RPJPD, (2) RPJMD dan (3) RKPD. Tahapan penyusunannya yaitu: (1) Penyusunan Rancangan Awal, (2) Pelaksanaan Musrenbang, (3) Perumusan Rancangan Akhir dan (4) Penetapan Rencana.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 99, RKPD sebagaimana dimaksud memuat: (1) rancangan kerangka ekonomi daerah, (2) program prioritas pembangunan daerah; dan (3) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud yaitu mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada pasal 100 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan tentang rancangan kerangka ekonomi, Program prioritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaan serta Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan RKPD

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang tertuang pada pasal 155 mengemukakan bahwa Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, meliputi: (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 menyampaikan definisi bahwa pengendalian dan evaluasi (P&E) perencanaan pembangunan daerah menurut Pasal 13 meliputi:

1. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
2. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan; dan evaluasi hasil.

Pada Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, menjelaskan definisi Pengendalian Kebijakan, Pengendalian pelaksanaan dan Evaluasi Hasil. Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud adalah untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP Tahun 2015.

Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud adalah untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.

Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2015.

Pada Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, Pengendalian kebijakan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2015. Sedangkan Pengendalian pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015. Untuk tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri.

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada rencana satu tahun yakni bidang ekonomi, terdiri atas: (1) sektor pertanian; (2) sektor peternakan; (3) sektor kelautan dan perikanan; (4) sektor perkebunan; (5) sektor ketahanan pangan; (6) sektor administrasi perekonomian dan SDA; (7) sektor kehutanan; (8) sektor perindustrian dan perdagangan; (9) sektor koperasi dan UMKM; (10) sektor penanaman modal; (11) sektor kebudayaan dan pariwisata.

Lokasi Kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dilaksanakan di wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur.

Jenis dan Sumber Data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut

Nawawi [4] metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian Deskriptif dapat dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik [5]. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Berdasar pada Permendagri No. 27 tahun 2014 gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Interval Nilai Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	Dibawah 51%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 27 Tahun 2014

Dalam Penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (Skala Intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Sedang

Gradasi sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

4. PEMBAHASAN

Secara umum, mayoritas pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi sudah berlangsung sangat baik. Indikasinya adalah program-program yang menjadi indikator/sasaran kinerja kunci pada setiap SKPD bidang ekonomi

terlaksana dengan dominasi kinerja fisik dan anggaran, yang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi berdasarkan pada parameter Permendagri No. 27/2014. Secara ringkas, berikut kinerja realisasi fisik dan anggaran pada setiap sektor di bidang ekonomi:

- 1) Sektor Pertanian: 3 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 1 Melebihi Target; 2 Sangat Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 3 Tinggi
- 2) Sektor Peternakan: 3 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 1 Melebihi Target; 2 Sangat Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 2 Sangat Tinggi; 1 Tinggi
- 3) Sektor Dinas Kelautan & Perikanan: 6 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 1 Melebihi Target; 5 Sangat Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 6 Sangat Tinggi
- 4) Sektor Perkebunan: 3 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 3 Sangat Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 3 Tinggi
- 5) Sektor Ketahanan Pangan: 4 program pembangunan
- 6) Sektor Administrasi Perekonomian: 1 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: Melebihi Target
 - b. Kinerja Anggaran Program: Tinggi
- 7) Sektor Kehutanan: 3 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 3 Sangat Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 1 Sangat Tinggi; 2 Tinggi
- 8) Sektor Perindustrian & Perdagangan: 9 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 4 Melebihi Target; 1 Sangat Tinggi; 4 Rendah
 - b. Kinerja Anggaran Program: 2 Sangat Tinggi; 6 Tinggi; 1 Sangat Rendah
- 9) Sektor Koperasi & UMKM: 6 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 5 Sangat Tinggi; 1 Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 2 Sangat Tinggi; 3 Tinggi; 1 Sedang
- 10) Sektor Penanaman Modal: 5 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 2 Melebihi Target; 3 Sangat Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 2 Sangat Tinggi; 3 Tinggi

- 11) Sektor Kebudayaan & Pariwisata: 3 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program:
 - b. Kinerja Anggaran Program:
- 12) Sektor Administrasi SDA: 2 program pembangunan, dengan rincian kategori kinerja:
 - a. Kinerja Fisik Program: 1 Sangat Tinggi; 1 Tinggi
 - b. Kinerja Anggaran Program: 1 Tinggi; 1 Sedang

Berkaitan dengan pembangunan per-bidang, tentunya perlu adanya penekanan dan percepatan pada bidang – bidang tertentu:

- 1) **Bidang pertanian**, dorongan terhadap pengembangan tanaman hortikultura, konsistensi dan komitmen terhadap menjaga lahan pertanian atas alih fungsi lahan, upaya mengatasi kondisi cuaca dan iklim yang kian tak menentu mesti ada upaya menanggulangnya. Upaya menjaga produksi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan menjaga posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan.
- 2) **Bidang perkebunan**, Capaian produksi untuk tanaman semusim pada angka rata-rata 92%, sedangkan untuk tanaman tahunan 96,7% hal ini menandakan realisasi mendekati target yang ditetapkan tentunya untuk tahun-tahun mendatang perlu diupayakan menjaga tingkat produksinya. Komoditi perkebunan untuk tanaman semusim yang paling besar adalah tanaman tebu dan kedua tembakau, sedangkan untuk tanaman tahunan yakni kelapa, kopi, dan kakao. Kelima komoditi di atas mestinya menjadi *concern* pemerintah untuk menguatkan pada program-program tersebut. Program tersebut tentunya harus didukung dengan pemberdayaan petani perkebunan berkaitan dengan faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan.
- 3) **Bidang peternakan**, kejadian – kejadian luar biasa pada musim tertentu perlu diwaspadai karena akan berpengaruh pada produksi hasil peternakan Jawa Timur (misal: kejadian *Anthrax* dan *AI*), program insensinasi buatan pada ternak sapi potong perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas Jatim sebagai penyedia sapi potong nasional, hal ini sejalan dengan program nasional yang ingin menjaga kestabilan harga daging sapi nasional, dan mendorong program hibah *minifeedmill*.
- 4) **Bidang kelautan dan perikanan**, program yang perlu didorong adalah program produksi dan peningkatan produktivitas garam, peningkatan pengelolaan ekosistem pantai dan laut, seperti pengembangan pengelolaan

mangrove dan terumbu karang, berikutnya adalah dukungan terhadap Budidaya perikanan (utamanya dalam pengembangan balai benih).

- 5) **Bidang Kehutanan**, di bidang kehutanan (termasuk pula pertanian dalam arti luas) terdapat program tertentu yang sangat tergantung pada musim, sehingga hal ini mesti dicermati untuk serapan anggarannya mesti disesuaikan dengan periode serapan anggaran. Pemanfaatan sumber daya hutan mestinya didukung dengan peningkatan perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- 6) **Bidang industri dan perdagangan**, perlu adanya percepatan dan penguatan program dan kegiatan pada SKPD berkaitan, karena semakin cepatnya perkembangan sektor ini, sehingga perlu adanya regulasi / deregulasi bidang tersebut sesuai kebutuhan. Penguatan SDM Aparatur Sipil Negara di bidang industri dan perdagangan. Untuk menyusun perencanaan yang memadai perlu adanya *sistem data base, up dating data* secara periodik dan koordinasi dengan instansi terkait pada level kabupaten/kota, termasuk pemotretan existing dan isu terkini bidang perindustrian dan perdagangan.
- 7) **Bidang Koperasi & UMKM**, peningkatan keberadaan UMKM yang mapan dan mampu bersaing, mendorong keberadaan Jawa Timur sebagai propinsi yang sedang berkembang di sektor industri dan perdagangan. Dukungan institusi utamanya dalam peningkatan UMKM yang memiliki legalisasi usaha, terdaftar dan memiliki sertifikat HAKI dan keberadaan produk UMKM yang memiliki standarisasi SNI, halal dan BPOM.
- 8) **Bidang penanaman modal**, perlu adanya *supporting* terhadap investor yang telah mengajukan ijin prinsip, didorong untuk merealisasikan investasinya, perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang penanaman modal
- 9) **Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**, program – program yang mendorong pengembangan destinasi Jawa Timur mesti dikembangkan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga mesti dilakukan,
- 10) **Bidang Administrasi Perekonomian dan SDA**, didorong untuk semakin mensupport aktivitas perekonomian Jawa timur, melalui regulasi dan deregulasi bidang ekonomi, yang selaras dengan program nasional (pusat).

Identifikasi Permasalahan Umum. Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dikelompokkan dalam dua hal besar, yakni:

1) Permasalahan administrasi, regulasi dan aturan

- Anggaran DAK sebagian mengalami tingkat serapan yang tidak optimal.
- Adanya kegagalan lelang, tidak sesuai spesifikasi,
- Adanya pengalihan kegiatan, yang tidak sesuai dengan DIPA yang direncanakan di awal.
- Masih adanya permasalahan kesalahan akun (*account*) pada sistem penganggaran yang dibangun.
- Masih diperkenalkannya revisi target kinerja fisik pada pertengahan tahun, sehingga ini membuka peluang bagi SKPD untuk manic/turunkan target, yang memungkinkan ini sebenarnya tidak memotivasi untuk mengoptimalkan kinerja lebih baik lagi.
- Program dan kegiatan yang direncanakan untuk PAK, umumnya dimulai pada bulan Oktober, ada peluang memiliki keterbatasan *space* waktu, sehingga perlu perencanaan yang ketat, termasuk proses monitoring nya.
- Adanya aturan – aturan baru yang pada tataran teknis perlu adanya penyesuaian kembali. (misalnya aturan penggunaan hotel untuk acara pertemuan dan pelatihan yang dibatasi).
- Masih ada unit – unit tertentu yang mengalami kesulitan dalam hal sinkronisasi dan koordinasi.

2) Permasalahan substansi

- Terdapat program – program SKPD propinsi yang tidak selaras dengan program pada tingkat kabupaten.
- Data – data yang *out of date* atau tidak *update* secara periodik, sehingga berdampak pada penyusunan rencana atau target kinerja yang buruk.
- Kompetensi Sumber daya Manusia yang menangani program kurang memadai.
- Permasalahan ketersediaan sumber daya tersedia (seperti: sumber daya lahan pertanian, bersinggungan dengan sumber daya lahan industri).

7. KESIMPULAN

Secara umum, mayoritas pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi sudah berlangsung sangat baik. Indikasinya adalah program-program yang menjadi indikator/sasaran kinerja kunci pada setiap SKPD bidang ekonomi terlaksana dengan dominasi kinerja fisik dan anggaran, yang berada pada kategori sangat tinggi

dan tinggi berdasarkan pada parameter Permendagri No. 27/2014.

Beberapa saran yang dapat dipergunakan untuk perbaikan proses pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dirunut pada beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat, mestinya perlu disinkronkan dan memberikan urun saran untuk perbaikan dan peningkatan dalam persyaratan administrasi dan *schedule* pelaksanaannya.
- 2) Persoalan lelang dan sistem pengadministrasiannya memang perlu ditingkatkan sistem dan polanya.
- 3) Sistem perencanaan yang lebih ketat aturannya, sistem dan mekanismenya. Sehingga tidak dengan mudah mengubah target kinerja anggaran maupun kinerja fisik.
- 4) Penyempurnaan sistem akuntansi berbasis komputer / online.
- 5) *Up dating* data tertentu yang dilakukan secara periodik membantu tersusunnya perencanaan yang lebih baik.
- 6) *Up grading* dan peningkatan SDM perencanaan, pengelola dan pelaksana menjadi salah satu daya dukung peningkatan kinerja institusi pemerintahan.
- 7) Perlu disusun pedoman umum (Pedum), petunjuk pelaksanaan (Juklak), dan petunjuk teknis (Juknis) yang lebih relevan dan komprehensif sebagai acuan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Beberapa dokumen acuan tersebut juga seharusnya diterbitkan lebih awal sebelum proses pelaksanaan sudah dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama berbagai pihak, untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Timur, Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) FEB Universitas Brawijaya

Malang, Supporting staf, Dwindi Rahmadya dan Dwi Ardi dan Tim homebase, serta Kolega di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hasibuan, Malayu SP. 1993. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Gramedia
- [2]. Riyadi, dan Deddy Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [3]. Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Terjemahan Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [4]. Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.
- [5]. Basuki, Sulistiyo, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan FIB Universitas Indonesia* 2006
- [6]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- [7]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
- [8]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah